Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah
ISSN: 1907-6258
EISSN: 2808-9308
Volume 12, Number 2, 2021

PENGARUH INDUSTRI GULA MASA KRISIS *MALAISE* TERHADAP MASYARAKAT DI KARESIDENAN JEPARA TAHUN 1930 – 1940

Agnes Petrus
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
agnes.petrus@student.uny.ac.id

Abstrak

Pada tahun 1929 perekonomian dunia mengalami kelesuan yang disebabkan oleh anjloknya bursa saham di New York. Krisis ekonomi menyebabkan industri gula di Hindia – Belanda kehilangan negara tujuan ekspor, yang kemudian diikuti dengan pembatasan produksi gula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi industri gula masa krisis malaise, dan dampaknya terhadap masyarakat di Karesidenan Jepara tahun 1930 – 1940. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah kritis yang meliputi 4 langkah diantaranya; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 1930 – 1940, di wilayah Karesidenan Jepara terjadi penurunan industri gula. Hal tersebut dilihat dari menurunnya luas areal perkebunan dan pabrik gula yang awalnya berjumlah 11 pabrik, pada masa krisis tersisa 8 pabrik yang masih beroprasi. Penurunan tersebut berdampak pada banyaknya tanah yang telah disewa dikembalikan ke tuan tanah, beralihnya alat pembayaran kembali menggunakan barang (*barter*), munculnya permasalahan sosial, pengurangan tenaga kerja dan upah buruh mengalami pemangkasan.

Kata Kunci : Industri Gula, Krisis Malaise, Karesidenan Jepara

Abstract

In 1929 the world economy experienced a slump caused by the collapse of the stock market in New York. The economic crisis caused the sugar industry in Dutch East Indies to lose export destinations, which was then followed by restrictions on sugar production. The purpose of this study was to determine condition of the sugar industry during great depression, and it's impact on society in Jepara Residence in 1930 – 1940. The method used in this research is critical historical method which includes 4 steps including; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that during the period 1930 – 1940, in Jepara Residence area there was a decline in the sugar industry. This can be seen from the decline in the area of plantations and sugar factories which initially amounted to 11 factories decrease only 8 factories that were still operating during crisis. This decrease has an impact on the amount of land that been rented back to the landrord, the change of means of repayment using goods (barter), the emergence of social problems, reduction of labor and wages of workers experiencing cuts.

Keyword: *Sugar Industry, Great Depression, Jepara Residence.*

PENDAHULUAN

Paska dihapuskannya tanam paksa (*cultuurstelsel*), menandakan Hindia – Belanda memasuki periode baru. Periode 1870 – 1900, umumnya disebut sebagai era liberal. Banyak pemodal swasta yang menanamkan modalnya di Hindia – Belanda, terutama di bidang pertanian (Colin Brown, 2003: 89). Dilaksanakannya politik pintu terbuka (*open door policy*) juga semakin mempermudah para pengusaha swasta asing untuk menyewa tanah – tanah milik rakyat pribumi. Tanah – tanah yang disewa kemudian digunakan untuk membuka lahan perkebunan dan pabrik.

Perkembangan industri yang semakin pesat juga mempengaruhi perluasan perkebunan yang ada di Hindia – Belanda. Sistem perkebunan yang diterapkan di Jawa berlaku juga di Karesidenan Jepara. Berkembangnya perkebunan termasuk industri gula ini dibuktikan dengan jumlah wilayah *onderneming* yang ada di wilayah tersebut. Setalah tahun 1900, jumlah *onderneming* yang dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu di wilayah Karesidenan Jepara sebanyak 11 daerah (Darmia Kurniasih, 2016: 69 -70). Tahun 1920 merupakan puncak dari penanaman tebu di Wilayah Karesidenan Jepara. Kemudian, di tahun 1921 jumlah areal perkebunan tebu mulai mengalami penurunan. Dari luas lahan sebesar 10.089 bau pada tahun 1920, menjadi hanya sebesar 7.308 bau pada tahun 1929 (Darmia Kurniasih, 2016: 71). Penurunan ini tidak lepas dengan adanya krisis yang melanda perekonomian dunia. Menurunnya kondisi ekonomi Amerika Serikat turut mempengaruhi negara – negara produsen.

Krisis yang mengguncang perekonomian dunia ini diawali dengan peristiwa yang menimpa perekonomian di Amerika Serikat. Spekulasi saham dalam pusat – pusat keuangan internasional terutama di Wall Street New York dan bursa di London. Pada 24 Oktober 1929 *Bank of England* melepaskan mata uangnya (*pound sterling*) dari standar emas (20 September 1931). Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak negeri yang kemudian dikenal dengan *blok sterling* (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 122).

Hindia – Belanda pada saat itu menjadi negara dengan produksi berorientasi ekspor sehingga rentan terhadap siklus perdagangan yang terjadi.

Masuknya Hindia – Belanda pada jaringan ekonomi internasional menyebabkan terseret ke dalam krisis tersebut. Pada 1930 di Hindia – Belanda kesulitan mencari daerah ekspor sedangkan pada saat yang bersamaan jumlah produksi gula tengah memasuki titik puncaknya. Apabila pada umumnya ekspor turun 60 sampai 50%, untuk produksi gula keadaanya lebih parah. Produksi gula di Jawa pada tahun 1929 adalah 2.935.317 ton, pada tahun 1935 merosot menjadi 513.554 ton. Sebagai dampak penghematan utama dalam sektor upah kerja, upah untuk tahun 1929 berjumlah 102 juta gulden, pada tahun 1934 merosot hanya f 9.714.000 (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 123). Sesuai dengan hukum ekonomi pasar maka apabila jumlah penawaran semakin berkurang dibandingkan jumlah permintaan, harga akan terus menerus mengalami kenaikan (Bambang Sulistyo, 1995: 54).

Depresi ekonomi yang terjadi menyebabkan jatuhnya harga – harga pada semua sektor, perdagangan dunia menjadi lesu, selain itu adanya krisis ini menyebabkan perbankan, industri atau pabrik – pabrik tidak berjalan bahkan ada yang tidak berfungsi di Hindia – Belanda sendiri. Jatuhnya industri gula memiliki efek yang semakin besar pada bidang ekonomi. Permintaan ekspor gula menurun drastis diikuti dengan pembatasan produksi gula untuk menanggulangi masalah krisis, menyebabkan jumlah lahan yang ditanami tebu semakin berkurang. Banyak perusahaan – perusahaan gula yang kemudian menutup pabriknya dan berdampak pada semakin berkurangnya daerah perkebunan. Hal ini kemudian menimbulkan masalah pengangguran dari pekerja industri gula dan berujung pada kemiskinan yang melanda masyarakat di Hindia – Belanda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian akan difokuskan pada pengaruh industri gula di masa krisis dan melihat respon masyarakat Karesidenan Jepara terhadap situasi yang terjadi pada tahun 1930-1940. Lingkup temporal yang digunakan pada tahun 1930 bersamaan dengan dimulainya krisis Malaise sampai tahun 1940.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis Metode sejarah digunakan dalam proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1985: 39). Adapun dalam penelitian ini menggunakan langkah – langkah antara lain, heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Tim Prodi Ilmu Sejarah, , 2013: 6).

Pertama, heuristik yaitu tahap pengumpulan data atau sumber sejarah yang relevan baik dalam bentuk arsip, koran sejaman, dan buku – buku pendukung lainnya. Sebagai contoh arsip terbitan resmi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Indisch Verslag* 1931; 1935; 1936; 1937; 1939; 1941. Tahap kekedua, verifikasi yaitu tahap pengkajian otentisitas dan kredibilitas sumber – sumber yang telah diperoleh baik dari segi fisik maupun isi sumber. Selanjutnya tahap ketiga, interpretasi yaitu tahap menyusun fakta – fakta sejarah yang diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu tahap untuk menyampaikan sintesis dalam bentuk tulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Industri Gula di Karesidenan Jepara Sebelum Tahun 1930

a. Gambaran Wilayah Karesidenan Jepara

Karesidenan Jepara masuk ke dalam salah satu wilayah di provinsi Jawa Tengah. Secara geografis wilayah Karesidenan Jepara masuk ke dalam pesisir Pantai Utara Jawa. Letak Karesidenan Jepara yang strategis pernah menjadikannya pelabuhan terpenting di Pulau Jawa. Selain letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan, wilayah Karesidenan Jepara juga memiliki tanah yang subur, kondisi tersebut mendukung wilayah Karesidenan Jepara terutama sekitar Gunung Muria sampai Juwana menjadi salah satu pusat perkebunan tebu. Faktor pendukung lainnya adalah daerah Pantai Utara Pulau Jawa memiliki sistem pengairan sawah yang sangat baik.

Pada abad ke – 19, Karesidenan Jepara memiliki empat *afdelling* yaitu Jepara, Juana, Pati, Kudus. Pada tahun 1870, kekuasaan tertinggi di Karesidenan

Jepara dipegang oleh orang Belanda yang berperan sebagai Residen. Masing – masing *Afdeling* atau kabupaten dipimpin oleh seorang bupati (Zayana Sifa, , 2013: 36).

Pada tahun 1901, 1929, dan 1930 Karesidenan Semarang mengalami perubahan administratrif wilayah, di mana perubahan ini juga berpengaruh pada wilayah administratif wilayah Karesidenan Jepara. Reorganisasi administratif tahun 1901 Karesidenan Jepara dimasukkan ke Karesidenan Semarang. Tahun 1929, batas – batas ini kembali mengalami perubahan, dan Karesidenan Semarang dibagi menjadi dua kabupaten. Akhirnya pada tahun 1930, batas wilayah kembali lagi seperti pada waktu abad ke – 19, yakni terdiri dari kabupaten – kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Reorganisasi administraasi di Karesidenan Jepara terjadi lagi pada 1934 dengan hasil berupa penggabungan antara wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, dan Blora dengan Kabupaten Rembang dan Pati, sehingga menjadi wilayah Karesidenan Jepara – Rembang (*Residentie* Jepara – Rembang) (Moehadi, dkk, 1988: 13).

Penduduk di wilayah ini sebagian besar berprofesi sebagai pelaut dan buruh di perkebunan tebu maupun di pabrik – pabrik gula. Mata pencaharian penduduk Jepara cukup beragam. Persentase angkatan kerja untuk wilayah Karesidenan Jepara yang paling besar terdapat pada kelompok manufaktur.

b. Kondisi Industri Gula sebelum Tahun 1930

Pada awal tahun Sistem Tanam Paksa dilaksanakan, di Karesidenan Jepara hanya terdapat satu pabrik gula yang terletak di Distrik Selowesi. Pada kurun waktu 1836 sampai 1850 banyaknya pabrik tidak menentu. Jumlah pabrik terbanyak di tahun 1850, beberapa tahun setelah itu jumlahnya menurun menjadi 9 pabrik sampai berakhirnya Sistem Tanam Paksa di Karesidenan Jepara (Zayana Sifa, , 2013: 66-67).

Penanaman tebu secara paksa di Jawa dihapuskan seluruhnya pada tahun 1891 hal ini ditetapkan pada Pasal 1 *Suikerwet* atau Undang – Undang Gula (*indische staatsblad* 1870. No. 117). Mulai dari waktu itu, penanaman tebu diserahkan ke tangan para pengusaha perkebunan swasta Belanda, dan harus

dilakukan berdasarkan sistem penanaman bebas yaitu menyewa sawah penduduk dan menggunakan buruh upahan (Akira Nagazumi, 1986: 42).

Setelah tahun 1900, penanaman tebu oleh perusahaan – perusahaan gula terus berkembang. Jumlah *onderneming* yang dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu di wilayah Karesidenan Jepara diantaranya, yaitu Langsee, Trangkil, Tanjungmodjo, Klaling, Rendeng, Besito, Bendokerep, Pakkis, Pecangaan, Banyuputih, dan Mayong. Tahun 1903 dan 1905 onderming Klaling tidak lagi melakukan penanaman tebu dan Bendokerep hak sewanya diambil alih oleh Tanjungmodjo.

Tahun 1920 merupakan puncak dari penanaman tebu di Karesidenan Jepara. Memasuki tahun 1921 hingga 1929 jumlah areal perkebunan tebu mulai mengalami penurunan. Penurunan luas areal tersebut merupakan salah satu akibat dari masalah perekonomian dunia yang tengah sulit pada tahun itu.

B. Kondisi Industri Gula di keresidenan Jepara Pada Masa krisis Malaise Tahun 1930-1940

a. Latar Belakang Krisis Malaise

Penyebab utama dari adanya malaise ini yaitu dimulai dengan peristiwa yang sering dikenal dengan istilah Selasa Hitam atau *Black Tuesday*, yaitu anjloknya bursa saham New York pada Oktober 1929. Selain jatuhnya bursa saham di New York, Lewis memberikan 8 faktor yang memiliki kausalitas terjadinya depresi ekonomi antara lain, keterbatasan cadangan emas dunia, semakin ketatnya sistem ekonomi dunia yang membuat upah, biaya, dan harga menjadi kurang fleksibel, inflasi kredit di Amerika Serikat, tingkat konsumsi yang lebih rendah, keletihan dalam penanaman modal, krisis bank pada 1930 – 1932, tingkat hutang yang tinggi, serta kebijaksanaan sistem penggajian yang ketat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pengusaha (Soegijanto Padmo, *Humaniora*, No. 2 1991: 149).

Amerika Serikat menjadi negara yang mendapat pukulan paling keras dari adanya peristiwa tersebut. Jatuhnya perekonomian Amerika Serikat tidak hanya berimbas di wilayah tersebut saja, pada kenyataanya krisis tersebut berefek domino ke daratan Eropa, Afrika, Asia, bahkan Australia.

Hancurnya perekonomian di negara Eropa ini mempengaruhi kegiatan ekspor dari negara penghasil komoditi ekspor, termasuk Hindia - Belanda. Hal tersebut terjadi karena negara – negara Eropa merupakan daerah tujuan ekspor hasil komoditi perkebunan. Kerajaan Belanda dan pemerintah Hinda – Belanda tidak mengikuti langkah *blok sterling*, mereka tetap mempertahankan standar emas dan tidak mendevaluasi guldennya. Konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia adalah harga – harga komoditi yang turun. Penyebutan *Malaise* untuk krisis ini tidak lain karena setiap usaha yang dilakukan selalu meleset (gagal) tidak membuahkan hasil (Diska Meizi Arinda, dkk, Vol. 6, No. 1, 2017: 13).

b. Kondisi Industri Gula di Hindia – Belanda Masa Krisis Malaise

Komoditas ekspor di Hindia – Belanda yang mengalami kemerosotan signifikan selama masa depresi ekonomi adalah hasil perkebunan. Penurunan daya beli pada negara – negara tujuan ekspor menyebabkan penurunan harga pula pada hasil perkebunan dan jumlah ekspor.

Kondisi demikian mendorong Pemerintah Hindia – Belanda menyetujui perjanjian *Chadbourne* tentang pembatasan internasional pada 9 Mei 1931. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan produksi dan konsumsi dengan penjatahan ekspor. Tindak lanjut dari adanya perjanjian tersebut yaitu pemerintah Hindia – Belanda mengeluarkan Undang – Undang Ekspor Gula (Mahesti Hasanah, 2015: 99 – 100).

Kemudian tahun 1932 Pemerintah Hindia – Belanda mengeluarkan *Verbansuiker – Ordonnantie* yang mengatur penjualan secara tunggal atau *single seller* di bawah pengawasan pemerintah. Pemerintah kemudian membentuk organisasi NIVAS (*Nederlands Indische Vereeniging voor de Afzet van Suiker*) (W.K.H. Feuilletau de Bruyn, 1941: 58). NIVAS inilah yang kemudian memonopoli perdagangan, sebab NIVAS akan menentukan harga jual dan jumlah produksi masing – masing pabrik gula.

Pemerintah Hindia – Belanda juga melakukan pengurangan jumlah pabrik dan penanaman tebu (*senering*). Selain itu, melalui Ordonansi Peraturan Perdagangan (*Bedrijfsreglementerings-Ordonnantie*) Pemerintah juga melakukan

pembatasan kuota impor, khususnya barang – barang dari Jepang (J. Thomas Lindblad, 1998: 240 – 242).

Banyaknya peraturan yang perlu dibahas dan diubah menyebabkan nasib ketidakpastian pada pabrik – pabrik gula. Akibatnya, banyak pabrik gula yang mendadak bangkrut. Sejak tahun 1937 setelah krisis ekonomi mulai mereda, industri gula di Indonesia mulai pulih kembali sehingga pada tahun 1940 jumlah pabrik gula ada 92 buah dengan luas areal 83.521,5 ha dan tingkat produksinya 17,63 ton per ha (Mubyarto dan Daryanti, 1991: 12).

c. Kondisi Industri Gula di Karesidenan Jepara Pada Masa Krisis Malaise

1. Pabrik Gula Pada Masa Krisis Malaise

Wilayah Karesidenan Jepara memiliki 9 buah pabrik gula yang bekerja sama dengan pemerintah pada tahun 1870 – 1890. Kesembilan pabrik gula tersebut ialah PG. Klaling, Tandjoengmodjo, Rendeng, Besito, Petjangaan, Mayong, Langse, Trangkil, dan Pakkis. Kemudian memasuki tahun 1900an pabrik – pabrik gula yang ada di Jepara bertambah beberapa buah yaitu PG. Bendokerep, Banjoepoetih, dan PG. Bandjaran (Darmia Kurniasih, 2016: 79).

Upaya penyehatan industri gula menjadi salah satu banyaknya pabrik gula harus tutup, begitu pula yang terjadi di Karesidenan ini. Pabrik gula yang awalnya berjumlah 11 pabrik, pada masa krisis tersisa 8 pabrik yang masih beroprasi. Ke-8 pabrik tersebut diantaranya: Pakkies; Rendeng; Petjangaan; Tjepiring; Langsee; Trangkil; Mayong; dan Tandjongmodjo (*Proefstation Voor de Java Suikerindustrie Mededelingen 1936*, hlm. 1480 – 1483; *Proefstation voor de Java Suikerindustrie Jaargang* 1938, hlm.1163 dan 1171). Rincian luas lahan yang digunakan untuk menanam tebu di Karesidenan Jepara.

Tabel 1
Luas lahan yang digunakan untuk menanam tebu di Karesidenan Jepara tahun 1931 – 1935, 1938 dan 1939

Perusahaan	Total Tanah (Ha)						
	1931	1932	1933	1934	1935	1938	1939
Tjepiring	1.698	1.549	98	1.056	911	1400	1454
Rendeng	1.542	1.277	1.341	-	896	1107	1143

Langsee	1.029	858	105	30	-	-	-
Trangkil	735	626	3.447	21	690	663	667
Pakkies	931	839	875	-	1	-	-
Petjangaan	1.054	897	44	600	468	-	-
Majong	677	626	-	-	-	-	-
Tandjongmodjo	1.680	1.456	-	-	-	-	-
Total	**9.346**	**8.128**	**5.910**	**1.707**	**2.966**	**3.170**	**3.264**

Sumber: *Indisch Verslag*

Pada rentang tahun 1931 hingga 1935 tercatat tahun 1931 perkebunan tebu seluas 9.346 Ha. Kemudian di tahun 1934 luas perkebunan mengalami penurunan yang signifikan, luas perkebunan di Karesidenan Jepara pada tahun hanya 1.707 Ha. Pabrik gula Tjepiring, Trangkil, dan Petjangaan menjadi 3 pabrik yang tetap konsisten beroprasi pada 1931 hingga 1935. Luas lahan perkebunan mulai mengalami kenaikan kembali setelah tahun 1935, di tahun 1938 luas lahan yang digunakan yaitu 3.170 ha dan tahun 1939 seluas 3.264 ha.

2. Penyempitan Lahan Perkebunan Tebu

Pengurangan produksi yang dilakukan mengakibatkan dikembalikannya tanah yang telah disewa pada tuan tanah. Hal tersebut mengakibatkan tuan tanah tidak lagi mendapat hasil sewa, beberapa juga terlilit hutang dengan penyewa tanah karena tidak mampu mengembalikan uang pangkal yang diterima. Petani pemilik tanah yang menanam tanaman komersil terpaksa harus kembali pada tanaman pangan.

Salah satu daerah yang mendapat imbas turunya kemakmuran perekonomian dari adanya krisis yaitu daerah Tayu. Pabrik gula sudah tidak beroprasi sejak 1932, penyewaan tanah tidak dilakukan lagi, dan disusul dengan pemberhentian semua buruh tetap pada tahun 1933. Kemudian pada tahun 1935 ketika pabrik menghentikan penggilingan tebu, tidak lagi dilakukan pembayaran, kecuali untuk gaji beberapa orang penjaga bangunan pabrik (Frans Husken, 1998: 147).

Pasar – pasar desa di Kawedanan Tayu antara tahun 1930 dan 1936 hanya menghasilkan separo sampai dua pertiga hasil retribusi bulanan yang diberlakukan pada akhir 1920-an. Hilangnya sumber – sumber penghasilan dalam bentuk uang

ini menyebabkan ekonomi pertukaran barang semakin banyak dilakukan. Dalam kurun waktu tersebut berbagai pembayaran umumnya dilakukan dalam bentuk *natura* (barang) tidak lagi dalam bentuk uang (Frans Husken, 1998: 147). Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwasanya krisis yang melanda mengakibatkan kembalinya pembayaran dengan cara tradisional kembali dalam bentuk barang atau *barter*.

Pada masa ini, para petani kaya yang di tahun 1920-an meraih keuntungan paling banyak, menjadi kalangan yang paling terpukul. Pemilik tanah kecil dan para tunakisma tidak begitu dirugikan oleh krisis ekonomi, sebagian besar dari mereka sebelumnya memang hidup di garis kemiskinan.

C. Dampak Industri Gula Masa Krisis Malaise terhadap Masyarakat Di Karesidenan Jepara Tahun 1930-1940

a. Permasalahan Sosial

Selain menimbulkan kemunduran ekonomis yang nyata bagi hampir seluruh lapisan masyarakat, *balance budget* yang tetap dipertahankan, memicu dampak depresi ekonomi meluas dan dirasakan di bidang – bidang kehidupan lain. Dampak sosial dari depresi ekonomi pertama – tama dapat dilihat di bidang pendidikan (Onghokham, 1989: 43).

Salah satu pendidikan yang juga berkembang pada masa itu adalah kursus kerajinan. Tahun 1936, bupati Jepara mengajukan peminjaman sebidang lahan untuk dijadikan sekolah kerajinan. Tanah yang akan digunakan untuk bangunan sekolah ini tidak diberikan secara cuma – cuma, yakni berdasarkan sewa. Sewa yang ditetapkan untuk dibayar setiap bulannya yakni sebesar f 1,50, begitupula dengan biaya pemeliharaan juga harus dibayar oleh pihak penyewa (ANRI, Ven W GB No. 1428).

Dampak sosial lain yang muncul dari adanya depresi ekonomi ini adalah semakin maraknya kerusuhan di tahun 1930. Kerusuhan yang terjadi di perkebunan tebu yaitu dilakukannya pembakaran area perkebunan oleh para buruh perkebunan. Kerusuhan dilatarbelakangi oleh upah dan sewa tanah yang rendah diberikan oleh pihak perkebunan tebu. Keadaan ekonomi masyarakat yang kian terjepit dengan berbagai pajak yang harus dibayar serta kebutuhan ekonomi yang

semakin naik, menimbulkan terjadinya pencurian hewan ternak, pencurian air di irigasi milik perkebunan, dan juga telah marak terjadi perbanditan.

Sebagai akibat krisis ekonomi, pemerintah juga melakukan penghematan dan pengurangan alokasi dananya di sektor kesehatan. Daerah Karesidenan Jepara juga menjadi salah satu wilayah yang juga merasakan dampak tersebut. Rendahnya pendapatan masyarakat menjadikan mereka tidak hanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer, tetapi juga pada permasalahan kesehatan.

Selain kurangnya biaya kesehatan dari masyarakat, ditinjau dari pihak pemerintah pun juga terbatas dalam memberikan fasilitas kesehatan. Pada akhir tahun 1933 jumlah rumah sakit sipil di Jawa dan Madura sebanyak 42 dan di luar daerah (luar Jawa) sebanyak 28, sedangkan pada akhir tahun 1934 masing – masing berjumlah 35 dan 27. Selama tahun 1934 Lembaga Rumah Sakit Nasional di Lubukpakam, Tangerang, Jepara, Pekalongan, Pemalang, Probolinggo, Wonosobo dan Malang dengan kapasitas 586 tempat tidur dihentikan (*Indisch Verslag* 1935, *Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichtingen*, hlm. 290).

Pada tahun 1936 di pemukiman Jepara – Rembang banyak terjadi malaria di Desa Loenda, Sriwedari dan Soekoroekan. Kondisi gizi penduduk yang kurang baik menjadi salah satu penyebab mereka terkena wabah ini. Kemudian untuk menanggulangi masalah tersebut, *Binnenlandsch Bestuur* menyediakan nasi dan kacang – kacangan secara gratis. Penanganan tersebut membuahkan hasil karena pada akhir tahun 1936 kondisi gizi dapat dikatakan mulai membaik (*Indisch Verslag* Tahun 1937, *De Sociale Toestand*, hlm. 315). Mengatasi permasalahan malaria yang merebak pemerintah Hindia – Belanda dengan bantuan pihak sending dan perusahaan – perusahaan perkebunan dengan cara membangun tempat – tempat bagi klinik pedesaan di sekitar rumah – rumah sakit di pusat – pusat kediaman penduduk yang lebih luas (H. Baudet dan I. J. Brugmans, 1987: 316 – 317).

b. Pengurangan Tenaga Kerja

Perusahaan – perusahaan yang tidak beroprasi dan menutup produksinya menyebabkan para buruh kehilangan mata pencaharian, sebab itu peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Industri Gula di Karesidenan Jepara Tahun 1931 dan 1940

Spesifikasi	1929	1931	1935	1940
Buruh Tetap :				
Buruh Profesional	15.309	13.404	3.621	5.896
Mandor Tanaman	12.880	10.379	2.191	5.360
Pembantu Mandor	8.131	6.343	1.494	3.152
Buruh Musiman :				
Mandor Pabrik	6.781	6.814	1.543	3.535
Kuli Pabrik (Laki – Laki)	50.142	47.233	9.740	25.040
Kuli Pabrik (Perempuan)	8.212	7.624	1.547	3.270
Asisten Mandor Tanaman	10.014	7.867	876	3.812
Pengawas Tanaman	5.323	4.343	1.046	3.070
Kuli Kereta Api	14.971	15.440	3.055	8.679

Sumber : *Indisch Verslag 1931,* tabel 161, hlm. 220*, Indisch Verslag 1936,* tabel 161, hlm. 197*, Indisch Verslag* 1941, tabel 161, hlm. 248

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah buruh di industri gula mengalami penurunan setelah tahun 1929. Jumlah buruh industri gula di Jawa mengalami penurunan cukup drastis dari tahun 1931 hingga tahun 1935. Menjelang tahun 1940, seiring dengan teratasinya krisis yang terjadi menyebabkan jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan kembali.

Hilangnya pekerjaan karena penutupan pabrik dan pengurangan besar-besaran di areal penanaman paling parah dialami oleh karyawan tetap yang terampil, terutama staf administrasi dan teknis. Meskipun jumlah mereka kecil, mereka merasa sangat sulit untuk beradaptasi dengan situasi baru. Pelatihan dan gaya hidup mereka telah mempersempit rentang pilihan yang terbuka bagi mereka dan merampas fleksibilitas mereka. Karyawan tidak terampil, baik tetap maupun musiman, merasa lebih mudah untuk mengatasinya (R.E. Elson, 1984: 241). Kebanyakan dari mereka, terutama buruh lapangan, tampaknya sudah cukup siap mendapatkan pekerjaan karena pertanian domestik mengambil alih ladang-ladang yang ditinggalkan oleh pabrik dan membuka peluang baru.

Petani tak bertanah tidak mengalami penurunan kekayaan secara dramatis, meski demikian kondisi tersebut tetap mempengaruhi mereka, terutama mereka yang selalu bergantung pada upah kerja untuk membeli makanan yang mereka

butuhkan. Namun akibat kesulitan ekonomi tidak dapat dipungkiri banyak dari masyarakat yang menggadaikan tanahnya ke pelepas uang. Hal tersebut semakin memperburuk keadaan petani karena menambah beban mereka untuk melunasi tanah yang telah digadai. Pada kenyataannya dalam banyak kasus tersebut biasanya keadaan keuangan peminjam semakin hari semakin rendah, sehingga mereka tidak mampu untuk membayar angsuran hingga batas terakhir.

Akibat pengurangan penanaman tebu masyarakat dipaksa memproduksi lebih banyak padi di sawah – sawah mereka. Kenyataannya hasil panen yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan mereka, sebab sebagian harus di bayarkan kepada pengusaha atau pegadai tanah.

Kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun berusaha diatasi pemerintah dengan membangun lumbung desa atau bank desa yang memberikan pinjaman dalam bentuk barang. Modal yang digunakan yakni beras atau hasil panen yang disimpan oleh masyarakat setempat. Hasil pertanian masyarakat disisihkan 10% untuk dimasukkan lumbung guna mengurangi dampak paceklik. Jumlah lumbung desa di Karesidenan Jepara sebanyak 383 lumbung. Pada tahun 1938 tersedia 7.250.000 kg dan 465.600 gulden sebagai modal bersih (*Indisch Verslag*, 1939, tabel 136: 215).

c. Pengurangan Upah Tenaga Kerja

Politik deflasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial membuat perusahaan gula harus memotong upah buruhnya sebagai salah satu bentuk penghematan biaya. Sejak tahun 1929 hingga tahun 1933 jumlah upah menurun drastis. Tahun 1935 ketika krisis *malaise* sudah mulai berakhir, upah buruh bahkan belum stabil dan masih mengalami penurunan. Penurunan upah ini terus berlangsung hingga dua tahun pasca krisis malaise berakhir.

Besar kecilnya upah yang diberikan oleh para pengusaha industri gula pada masing – masing daera berbeda – beda, hal tersebut jelas berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat upah di wilayah Karesidenan Jepara sendiri sebelum adanya krisis ekonomi digolongkan paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Tabel 3
Upah Buruh di Karesidenan Jepara 1925 – 1930 (dalam Sen)

Tahun	Laki – Laki	Perempuan
1925	44	38
1927	45	40
1928	45	36
1929	44	37
1930	45	39

Sumber: *Indisch Verslag* 1931, tabel 160, hlm. 220.

Tahun 1925 upah buruh untuk laki – laki sebesar 44 sen, sedang untuk buruh perempuan sebesar 38 sen. Upah buruh paling rendah yang diterima oleh buruh perempuan terjadi pada tahun 1928 yakni sebesar 36 sen. Hingga tahun 1930 upah buruh perempuan tidak pernah mencapai 40 sen kembali. Upah para buruh di industri gula selama *malaise* melanda semakin mengalami penurunan cukup drastis.

Tabel 4
Upah Buruh di Karesidenan Jepara 1935 – 1940 (dalam Sen)

Tahun	Laki – Laki	Perempuan
1931	45	37
1932	36	32
1933	28	26
1934	26	25
1935	21	19
1936	21	21
1937	22	18
1938	26	20
1939	27	20
1940	26	20

Sumber : *Indisch Verslag* 1936, tabel 160, hlm. 197 dan *Indisch Verslag* 1941, tabel 160, hlm. 248.

Memasuki tahun – tahun krisis jumlah upah yang diberikan pada para pekerja mengalami penurunan. Di tahun 1931 yang mengalami penurunan upah hanya buruh perempuan, sedangkan laki – laki tetap. Upah buruh laki – laki paling rendah pada tahun krisis ini yaitu mencapai 21 sen, hal ini terjadi selama dua tahun berturut – turut yaitu 1935 dan 1936. Sedangkan untuk upah buruh perempuan

paling rendah terjadi pada tahun 1937 sebesar 18 sen. Tahun 1940, buruh laki – laki menerima upah 26 sen seddangkan perempuan 20 sen.

KESIMPULAN

Sejak tahun 1930 dampak dari adanya krisis sudah mulai dirasakan pada industri gula di Karesidenan Jepara. Semua aspek menurun baik dari jumlah pabrik, areal kebun tebu, volume produksi dan nilai penghasilannya. Harga gula dan permintaan ekspor yang menurun, serta Hindia – Belanda juga kehilangan negara tujuan ekspor menjadikan pemerintah turut ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa kebijakan juga diambil sebagai upaya mengatasi keadaan.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi krisis banyak mempengaruhi industri gula yang berada di Karesidenan Jepara. Upaya penyehatan industri gula menjadi salah satu banyaknya pabrik gula harus tutup termasuk penurunan luas lahan perkebunan, begitu pula yang terjadi di wilayah ini. Pabrik gula yang awalnya berjumlah 11 pabrik, pada masa krisis tersisa 8 pabrik yang masih beroprasi.

Banyak yang kemudian tanah – tanah yang telah disewa untuk ditanami tebu kemudian dikembalikan ke tuan – tuan tanah. Hilangnya sumber – sumber penghasilan dalam bentuk uang ini menyebabkan ekonomi pertukaran barang semakin banyak dilakukan. Selain menimbulkan kemunduran ekonomis, dampak depresi ekonomi juga meluas dan dirasakan di bidang sosial. Akibat semakin sulitnya kondisi ekonomi tidak sedikit masyarakat menggadaikan tanahnya pada para pelepas uang. Keadaan yang demikian menjadikan para pengusaha gula mengambil jalan tengah dengan melakukan pengurangan tenaga kerja dan upah dalam industri gula.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Indisch Verslag 1931; 1935; 1936; 1937; 1939; 1941.

Proefstation voor de Java Suikerindustrie Mededelingen 1936

Proefstation voor de Java Suikerindustrie jaargang 1938.

Buku dan Artikel

Bambang Sulistyo, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana Yogya, 1995.

Baudet, H., dan I. J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Colin Brown., *A Short History Of Indonesia: The Unlikely Nation ?*, Singapore: South Wind Productions, 2003.

Darmia Kurniasih, "Pengaruh Industri Gula Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di Karesidenan Jepara 1870 -1930", *Skripsi*, Yogyakarta: FIS UNY, 2016.

Diska Meizi Arinda, dkk. "Krisis Ekonomi di Banyumas 1930 – 1935 sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto Tahun 1937. *Journal of Indonesian History*. Vol. 6. No. 1 Desember 2017.

Elson, R.E., *Javanes Peasants and The Colonial Sugar Industry: Impact and Ahange in East Java Residency 1830 – 1940,* Singapore Oxford University Press, 1984.

Feuilletau de Bruyn, W.K.H., *Tien Moeilijke Jaren voor Landbouw en Industrie in Nederlands – Indie 1930 – 1940*. Bandung: W.Van Hoeve, 1941.

Husken, Frans, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Deferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 1985.

Mahesti Hasanah. *Ekonomi Politik Kolonialisme: Perspektif Kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Hindia Belanda dalam Mengelola Industri Gula Mangkunegaran pada 1870 – 1930*, Yogyakarta: Penerbit PolGov Fisipol UGM, 2015.

Moehadi, dkk., *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah*, Semarang: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Mubyarto dan Daryanti, *Gula: Kajian Sosial – Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Nagazumi, Akira, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial – Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia. 1989.

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia : Kajian Sosial Ekonomi.* Yogyakarta: Aditya Media. 1991.

Soegijanto Padmo, "Depresi 1930-an dan Dampaknya terhadap Hindia Belanda", *Humaniora*, No. 2, 1991.

Thomas Lindblad, J., *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia : Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 1998.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ilmu Sejarah, 2013.

Zayana Sifa, "Pengaruh Perkebunan Tebu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Karesidenan Jepara 1830 – 1870", *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.